

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

A. Pembangunan Gotong Royong

Paradigma struktural fungsional memandang masyarakat pada dasarnya selalu berada didalam keadaan harmonis dan tertib, dimana segala sesuatu yang baik bagi masyarakat sebagai keseluruhan baik pula bagi para anggota masyarakat secara individu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila strategi pembangunan gotong royong yang diturunkannya menganjurkan penggunaan strategi perubahan kemasyarakatan berlandaskan partisipasi luas seluruh lapisan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan masyarakat.

Tidak mengherankan pula apabila strategi gotong royong demikian percaya bahwa perubahan-perubahan kemasyarakatan dapat dicapai secara optimal melalui partisipasi luas dari segenap lapisan masyarakat pada tingkat komunitas, di dalam penentuan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan dimana prosedur yang bersifat demokratik kerjasama yang bersifat sukarela dan tujuan-tujuan pendidikan memperoleh peranan yang cukup besar.

B. Teknikal professional

Penggunaan strategi ini biasanya diberikan kepada kelompok-kelompok kerja dan organisasi-organisasi yang terdiri atas sejumlah kecil warga masyarakat 'terpilih' yang dimobilisasi untuk mengorganisasikan informasi-informasi mengurangi rasa takut terhadap resiko yang berhubungan dengan adopsi inovasi baru, menemukan cara-cara yang lebih kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan dengan demikian mengurangi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan program-program pembaharuan.

C. Strategi Konflik

Strategi konflik melihat masyarakat melalui suatu deskriminasi yang sangat tajam tentang perbedaan antara dua macam citra tentang struktur sosial dan perubahan kemasyarakatan citra ‘integratif’ dan citra ‘koersif’ yang memiliki konskuensi yang sangat berbeda didalam perwujudan strategi organisasional pembangunan masyarakat desa.

Pendekatan integratif terlalu memberikan tekanan pada citra masyarakat sebagai bagian-bagaian yang terintegrasi secara normative, strategi konflik sebaliknya menganggap bahwa ‘paksaan’ atau ‘kekuasaan’ adalah merupakan landasan yang lebih realistik bagi tertib sosial setiap masyarakat.

Strategi konflik menyatakan bahwa sebagai suatu sistem kemasyarakatan, masyarakat memelihara dan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya yang terus-menerus berubah melalui alokasi dan penggunaan kekuasaan. Strategi ini juga melihat masyarakat, sebagai suatu sistem sosial, bukan saja terdiri atas berbagai kelompok kepentingan akan tetapi juga atas distribusi kekuasaan yang tidak merata diantara kelompok-kelompok tersebut.

Strategi konflik melihat struktur kekuasaan masyarakat-masyarakat kita dewasa ini memberikan tekanan pada pemeliharaan stabilitas sosial dari pada pembagian yang lebih merata di dalam mengatur hubungan-hubungan antar kelompok dan antara kelompok dengan sumber-sumber daya masyarakat yang menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang semakin besar ditangan segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu.

D. Pembelotan Kultural

Asumsi mengenai watak manusia, paradig definisi sosial menganggap bahwa manusia menurut kodratnya adalah baik didalam integritas internalnya, di dalam hubungannya dengan alam di dalam kreativitas kulturalnya dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang bersifat manusiawi, penuh cinta kasih dan realisasi diri. Strategi teknikal professional melihat manusia pada dasarnya bersifat intelektual dan rasional, maka strategi pembelelotan kultural manusia menurut kodratnya bersifat emosional dan kultural.

Oleh karena itu masyarakat modern telah berkembang berlawanan dengan kondisi-kondisi struktural yang memungkinkan para anggota masyarakat mengembangkan kemungkinan-kemungkinan kemanusiaan mereka, strategi pembelotan kultural menyadari bahwa kebanyakan anggota masyarakat kontemporer telah gagal mewujudkan potensi-potensi kemanusiaan.

Perkembangan industrialisasi bersarkan teknologi modern telah berkembang melampaui batas optimim, sehingga masyarakat modern telah memenjarakan manusia dengan menciptakan lingkungan kehidupan yang memusuhi dan memisahkan mereka satu sama lain dan membuat mereka tergantung kepada 'experts'.

Didalam masyarakat dapat ditemukan dua macam keadaan : kemiskinan sekaligus kesenjangan atau tidak terdapat kemiskinan tetapi boleh jadi masih ada kesenjangan. Upaya menanggulangi kemiskinan sangat kompleks dan rumit, dan upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus kesenjangan jauh lebih kompleks dan rumit lagi.

Pemerintah dinegara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia telah merencanakan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan menurut Sunyoto Usman antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah : pembangunan pertanian (*agricultural development*), industry pedesaan (*rural industrialization*), pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*), serta strategi pusat pertumbuhan (*growth center strategy*).

a. Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan *output* dan pendapatan mereka. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan dipedesaan.

Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (baik di pedesaan maupun diperkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar

industry kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.

b. Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industry kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja.

Dalam prakteknya, program industrialisasi pedesaan ternyata tidak sederhana. Program ini dalam implementasinya menjumpai beberapa hambatan sehingga sukar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Hambatan tersebut antara lain terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa. Anggota masyarakat desa terkesan kurang siap yang menyongsong industrialisasi. Mereka umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai. Mereka juga kurang berani mengambil resiko dan sulit didorong didorong untuk melakukan reinvestasi. Keterampilan mereka pada umumnya masih tergolong rendah, *design* dan peralatan yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksinya terbatas, managemennya pun lemah sehingga sangat sukar meningkatkan kualitas produksinya.

c. Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)

Tujuan utama pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan menurut *Rehovot School* antara lain : (1) pertumbuhan pertanian sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan pedesaan, (meliputi diversifikasi usaha tani, keluarga tani sebagai unit organisasi, perkembangan simultan sistem penyangganya, organisasi oleh dan untuk petani, serta industrialisasi pedesaan). (2) urbanisasi sebagai factor promosi bagi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini lebih

menekankan transformasi sector pertanian sebagai *the prime mover*. Transformasi tersebut adalah perubahan secara gradual (tetapi pasti) dari pertanian *sub-sistence* menjadi pertanian komersial.

d. Strategi pusat pertumbuhan (*growth center strategy*)

Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini. Cara yang ditempuh adalah membangun atau mengembangkan sebuah pasar didekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, lazim disebut dengan *the centers of 'demonstration effect' of consumer goods*. Informasi semacam itu besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi *gambling* dalam pengembangan usaha.

Pusat pertumbuhan semacam itu diupayakan agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat seperti kota. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ini disamping dapat menjawab berbagai persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian, juga dapat dikelola sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa. Pengelolaannya semacam ini akan mengurangi ketergantungan dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kewiraswastaan.

E. Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Sasaran program ini adalah desa-desa miskin, baik yang berada di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Program ini dalam implementasinya tidak sendiri, tetapi diupayakan agar terpadu baik dengan program-program sektoral maupun regional yang kegiatannya mencakup desa-desa miskin tersebut.

Melalui program IDT ini diharapkan menjadi proses pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur sosial yang kondusif bagi peningkatan kapasitas masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dan perubahan struktur

sosial tersebut terutama dilakukan melalui : peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha, serta penguatan kelembagaan kelompok miskin. Dalam konteks ini, kelompok miskin ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan.

Untuk memberi dukungan proses pemberdayaan masyarakat dan perubahan struktur sosial melalui IDT, pemerintah telah menyediakan tenaga sarjana dan berbagai disiplin ilmu. Tenaga sarjana tersebut diharapkan dapat berperan sebagai Pembina kelompok miskin sehingga memiliki persamaan persepsi dan orientasi untuk mengembangkan diri menuju kesejahteraan hidup. Selain itu, mereka juga diharapkan berperan sebagai fasilitator, penghubung, pendorong serta penggerak dalam membentuk kelompok masyarakat IDT.

Dalam kenyataannya, implementasi program IDT sangat kompleks. Kondisi desa berkembang dan kelompok miskin dapat meningkatkan pendapatannya setelah menjadi bagian dari program IDT, tidak sedikit diantara desa tertinggal hampir tidak berkembang. Jumlah dana yang tersalur di desa-desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, pemanfaatannya tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, pembinaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Semua pihak sangat diharapkan memberi dukungan pada implementasi program IDT, terutama karena program ini menjanjikan kemandirian kelompok masyarakat kecil, yang secara ekonomis merupakan basis bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

F. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Agar sumber daya manusia tidak hanya menjadi beban pembangunan, maka perlu didayagunakan seoptimal mungkin. Untuk mencapai tujuan itu perlu upaya pengembangan potensi yang sudah ada. Meskipun upaya untuk menyatukan pengertian pengembangan potensi yang sudah ada. Meskipun upaya untuk menyatukan pengertian pengembangan sumber daya manusia telah banyak dilakukan oleh para pakar, ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketidaksamaan pengertian pengembangan sumber daya muncul sebagai

akibat tiap negara mempunyai pengertian yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan kewiraswastaan dan administratif, termasuk peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Komponen-komponen yang mendukung adalah :

- Pendidikan dan latihan
- Kesehatan dan gizi
- Kesempatan kerja
- Lingkungan hidup yang sehat
- Pengembangan karir ditempat kerja
- Kehidupan politik yang bebas (Tadjudin Noer Efendi)

UNDP (*United Nations Development Programme*) merumuskan pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya Pengembangan manusia (sumber daya manusia) adalah proses peningkatan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan (*a process of learning people's choices*). Hal ini bermakna bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekadar peningkatan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan manusia supaya kemampuan yang terbentuk tidak sia-sia.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan amanah untuk memberikan peluang partisipasi yang lebih riil kepada warga Negara melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, peluang kerja dan berusaha. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pembangunan, manusia sebagai inti dalam pembangunan, pembangunan harus bergerak disekitar manusia, bukan manusia disekitar pembangunan. Pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia.

Berdasarkan pengertian diatas pengembangan sumber daya manusia adalah upaya peningkatan peranan manusia dalam upaya meningkatkan peranan

manusia dalam proses pembangunan sesuai dengan kodrat manusia agar mereka mampu mengembangkan dirinya, menentukan pilihan-pilihan dan hak kebebasan (bebas dari kemiskinan dan kebodohan), pengembangan kreativitas dan penalaran serta mampu beradaptasi pada lingkungan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan harkat dan martabat dirinya serta patuh pada perintah tuhan (taqwa).

Bagaimana pengopersikan konsep diatas? Konsep itu tidak hanya dijabarkan pada pengembangan kemampuan individu, tetapi juga perlu disejajarkan pada pengembangan pada keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu perlu memperhatikan pengembangan agar kemampuan individu dapat berkembang. Pada tingkat keluarga, aspek yang perlu mendapat perhatian adalah peranan keluarga dalam membentuk kepribadian individu seperti norma-norma sosial dan budaya, tentang perilaku yang berkaitan dengan pengajaran dan pekerjaan.

Pengembangan sumber daya manusia pada tingkat individu dan keluarga tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia perlu dipertimbangkan aspek-aspek masyarakat seperti norma-norma moral dan sosial, sistem nilai dan sistem sosial. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah bersih jiwa, sehat jasmani, kuat intelegensia, tinggi disiplin, mampu menciptakan peluang kerja dan usaha, suka kerja keras dan peduli pada lingkungan.

Dengan demikian, konsep pengembangan sumber daya bersifat totalitas dan holistic. Arah pengembangan tidak hanya dipusatkan pada dimensi ekonomi, tetapi perlu memperhatikan dimensi sosial politik, budaya dan keagamaan. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas manusia yang sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat manusia.

G. Penanggulangan Kemiskinan

Sebelum mengemukakan penanggulangan kemiskinan ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Menurut Sunyoto Usman paling

tidak ada tiga macam konsep kemiskinan yaitu kemiskinan absolute, kemiskinan relative, kemiskinan subjektif. Konsep kemiskinan absolute dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret. Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). dirumuskan yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Sedangkan konsep kemiskinan subjektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri.

Kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik (Heru Nugroho) karena itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul jika fenomena kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka. Ini seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini menjadi perdebatan.

Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolute adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi, distribusi pendapatan suatu daerah. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi antar lapisan sosial.

Menurut Soejono Suekanto kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan, kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun isiknya dalam kelompok tersebut. Secara sosiologis penyebab timbulnya masalah tersebut karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi secara baik, yaitu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar kebidang-bidang lainnya, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.

Menurut Kementerian Sosial, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencarian, yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang

mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Kategori kemiskinan dibagi dua :

a. Kemiskinan kronis :

Kemiskinan yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sector dan berkelanjutan

b. Kemiskinan sementara

Kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditandatangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Beberapa langkah yang diperlukan dalam memperdayakan masyarakat miskin menurut Heru Nugroho sebagai berikut : pertama pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan.

Kedua setelah kesadaran kritis timbul, upaya-upaya memutus hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Ketiga tanamkan rasa kesamaan (egaliterani) dan berikan penyuluhan, kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial.

Keempat merealisasi perumusan pembangunan yang melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Kelima perlunya pembangunan sosial dan budaya masyarakat miskin. Selain perubahan structural yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai budaya. Keenam diperluakan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu : mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis

kemiskinan, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan didaerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan. Hasil-hasil pembangunan hendaknya merata ke seluruh penjuru tanah air, bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat dan dapat dirasakan segenap masyarakat.

Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara sosiologis, dimensi struktural kemiskinan dapat ditelusuri melalui *indtitutional arrangements* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata berakar pada “kelemahan diri”, strategi pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan dari pengambilan posisi pemerintah dalam merencanakan dan implementasi pembangunan ekonomi.

Di pedesaan, telah lama terjadi *green revolution* yaitu suatu bentuk transformasi yang dahsyat dari sistem pertanian sederhana menjadi sistem pertanian modern. Transformasi dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Namun demikian, mengapa isu kemiskinan masih belum terpecahkan? Bukankah baik petani kaya maupun miskin memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan fasilitas yang diintroduksi? Persoalannya memang tidak sederhana. Banyak barang dan jasa didistribusikan mengikuti jalur kekuasaan, mereka yang berkuasa lebih banyak memonopoli barang dan jasa.

Siklus monopoli diantaranya : pertama, berkaitan dengan akumulasi kapital. Petani kaya lebih banyak kesempatannya memperoleh aset-aset tambahan yang datang bersamaan dengan perkembangan teknologi modern pertanian, akibatnya mereka lebih cepat berkembang. Kedua, berkaitan dengan lembaga-lembaga yang di bentuk untuk perkembangan pertanian itu sendiri, lembaga-lembaga ini dibentuk untuk mengakomodasi fungsi produksi, struktur pasar dan preferensi konsumen. Namun kenyataanya, hanya petani kayalah yang lebih banyak menikmati jasa-jasa kelembagaan. Mereka adalah kelompok elit yang kerap kali

sangat determinan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan krusial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi.

Mudah-mudahan sudah menjadi jelas dari usulan diatas bahwa penanggulangan kemiskinan tergantung dari kebijakan politik-ekonomi pemerintah pada tingkat nasional. Kemiskinan struktural bila akan dikurangi samapai sekurang-kurangnya (minimal) dapat dicapai melalui sistem pajak progresif yang efektif dan memberi jaminan sosial ekonomi secara merata.

Perana pemerintah semakin berkurang besar kemungkinannya LSM dapat meningkatkan peranannya bukan hanya dengan advokasi, tetapi lebih nyata dengan mendampingi kelompok-kelompok rentan, mengangkatnya dari lembah kemiskinan ke tingkat kecukupan kebutuhan dasar manusia. LSM bekerja persuasive dalam scenario mikro, dapat berperan sebagai sumber penyuluhan, tenaga pendamping bagi kelompok-kelompok, penggerak gotong royong dan usaha-usaha lain yang digali dari modal sosial didaerah bersangkutan.

Prakarsa local agar dibimbing dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan local dulu, tetapi secara bertahap juga dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan wilayah yang lebih luas. Cara yang sudah sering dipopulerkan, juga dikalangan LSM sendiri adalah memandirikan kelompok sasaran sendiri, berdasarkan kekuatan dan kemampuan, sedikit mungkin dengan subsidi. Namun dalam prakteknya banyak LSM yang masih membantu menyalurkan kredit, yang berasal dari pemerintah atupun lembaga internasional melalui pemerintah. Beberapa LSM yang kuat jelas masih bisa menambah kepada jak kaum miskin, tetapi sifatnya lebih ke solidaritas sosial, agamawi atau filantropi.